

**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten
Bojonegoro (Studi Kasus di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro)**

Ameilia Eka Sari

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: ameliaekasari050@gmail.com*

Bambang Kusbandrijo

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: bambang_kusubandrijo@untag-sby.ac.id*

Indah Murti

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: indah@untag-sby-ac.id*

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan yang diberikan kepada KPM setiap bulan nya SEBESAR Rp.150.000.-melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program bantuan. Disposisi implementor terdapat sikap pelaksana yang baik, melayani KPM dengan ramah. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan tersebut, seperti halnya di desa bulaklo banyak yang demo akibat belum tepat sasaran. Dengan ini saran yang dapat diberikan Pemerintah perlu meningkatkan kualitas beras dan telur untuk penyaluran BPNT, dan sebaiknya pemerintah benar-benar bekerja sama dengan Perum Bulog yang dapat dipercaya kualitas beras dan telurnya yang layak untuk penyediaan pada Program BPNT serta pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi dengan perangkat desa dalam melakukan penentuan siapa saja yang berhak untuk menerima Program BPNT tersebut sehingga tidak ada permasalahan dan pemerintah pusat perlu menambah besaran jumlah mesin EDC sehingga tidak perlu repot Penanggung Jawab dan KPM untuk menggesek di Bank.

Kata Kunci : *Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Bojonegoro*

Pendahuluan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan sangatlah berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standart hidup masyarakat di suatu negara, kemiskinan sudah menjadi masalah global dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan . Beberapa program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan program kelanjutan dari Raskin yang berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera) pada tahun 2018, yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, program ini sama dengan Raskin hanya saja yang membedakan sebutan untuk programnya tersebut, namun pada tahun 2019 Kementrian Sosial optimis Rastra (beras sejahtera) diganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai yaitu bantuan berupa barang yang diberikan kepada seseorang atau keluarga yang tidak mampu selama setahun dibagikan 14 kali. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya maka akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 secara terus terang atau tidak berbelit-belit. Menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia. Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin akibat krisis ekonomi tahun 1998-1997, pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah yang dikenal dengan nama BPNT ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15kg untuk setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar Rp1600/kg dan besaran tunainya sebesar RP.150.000 /KPM/bulan. (Ismail, 2019). Adapun beberapa criteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 6T:

1. Tepat sasaran penerima manfaat : Rastra hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat rastra (DPM-1) hasil verifikasi dan PPL2008 BPS melalui musyawarah desa atau kelurahan yang telah disahkan oleh camat.
2. Tepat jumlah : Jumlah beras rastra yang merupakan hak RTS –PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15kg/bulan .

3. Tepat harga : Harga tebus rastra adalah 1.600/kg netto dititik distribusi.
4. Tepat waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
6. Tepat administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan Program BPNT harus mengacu pada indikator keberhasilan tersebut, yakni yang pertama, harus tepat sasaran maksudnya adalah penerima BPNT harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program tersebut. Kedua, maksudnya jumlah beras yang diterima RTS harus benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15 kg. Ketiga tepat harga, harga tebus rastra yang telah ditetapkan harus sama dengan harga yang ditebus oleh RTS. Ke empat tepat waktu, yaitu pendistribusian beras haruslah tepat waktu. Kelima tepat kualitas yaitu kualitas beras yang didistribusikan haruslah yang layak dikonsumsi tidak berbau, berketu, dan pecah-pecah. Keenam tepat administrasi, haruslah berkas-berkas yang dikumpulkan secara benar lengkap dan tepat waktu. (Keuangan, 2017)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disini, masih tergolong baru sehingga dalam proses pelaksanaannya masih banyak mengalami permasalahan salah satunya yaitu dalam hal ketepatan waktu dimana waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) belum sesuai dengan rencana distribusi, banyak molornya dalam penyaluran bantuan tersebut karena kedatangan beras dari Perum Bulog terkadang tidak tepat waktu dan mengenai kualitas beras BPNT yang di dapat Rumah Tangga Sasaran (RTS) di desa Penganten kualitas beras dan telur yang kurang bagus dan layak untuk dibagikan, masih ada beras dan telur yang busuk ataupun beras yang berwarna hitam.

Sedangkan kendala untuk desa Bulaklo yaitu belum tepat sasaran artinya orang yang menerima BPNT ini masih banyak rancu atau belum sesuai karena masyarakat yang kurang mampu justru tidak mendapatkan dan yang mampu justru mendapatkan bantuan tersebut, dan permasalahna lain nya yaitu belum adanya mesin EDC ATM di E-Warong yang digunakan untuk transaksi sehingga masih manual atau harus melakukan transaksi ke bank BNI yang bekerja sama dengan agen BPNT tersebut. Namun berdasarkan data dan fakta yang ada diatas sehingga dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, karena dapat kita lihat bahwa sangat pentingnya pelaksanaan program untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga keberhasilan BPNT masih kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kebijakan Program BPNT oleh pemerintah. Untuk mengukur Implementasi ini peneliti menggunakan teori Van Metter dan Van Horn (1975), karena dalam teori tersebut dapat dilihat dari enam variabel didalamnya yaitu: Standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, karkteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi

implementor dan kondisi sosial dan ekonomi. Dengan enam unsur tersebut, implementasi Program BPNT di Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui hasilnya. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bojonegoro.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian nya menggunakan teori Van Matter dan Van Carl Horn yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam Impelementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu ukuran dan tujuan kebijakan,sumber daya,karakteristik para sikap para pelaksana ,komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi,sosial,politik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kabupaten Bojonegoro yaitu wawancara, observasi, dan dokumentas. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan oleh cresswell (2009:266) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan /Verivikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Standart dan Sasaran Kebijakan

Standart dan sasaran kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini yang akan dikaji oleh peneliti yaitu, sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menjalankan kebijakan pelaksanaan program BPNT di desa Penganten dan desa Bulaklo karena standart dan sasaran kebijakan ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program ini jika kebijakan tidak dapat berhasil akan menjadi interpretasi karena dalam menjalankan program ini sangatlah membutuhkan kerja sama dari aktor pelaksana. Penentu keberhasilan program BPNT ini adalah pemerintah kelurahan dan desa karena program ini diterapkan disetiap kelurahan dan desa . Adapun sumber daya finansial dari dana yang ada pada program BPNT berasal dari Kementerian Sosial yang secara langsung di transferkan ke rekening-rekening KPM sebesar RP.150.000-/bulan . Untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh buku pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan sumber daya waktu yang digunakan untuk melayani para KPM, untuk waktu pelaksanaan BPNT sudah efektif, karena uang yang tersalurkan setiap bulan nya tidak ada kendala apapun. Hanya saja sumber daya pada fasilitas sendiri mengalami kendala adalah mesin EDC erros saat digunakan untuk transaksi untuk itu proses implementasi terganggu dan dapat menjadi salah satu faktor penghambat jalan nya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada karena Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program BPNT ini, apakah sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan yang ada atau belum. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial yaitu apakah dana yang dikeluarkan, sudah mumpuni dan mencukupi atau justru sebaliknya masih kurang dalam kelancaran pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut secara maksimal dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu waktu yang dimaksud apakah yang digunakan oleh pelaksana sudah cukup atau masih kurang, dan apakah waktu pelayanan terhadap masyarakat sudah sesuai dengan waktu yang tepat karena tanpa adanya sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu suatu kebijakan tidak akan berhasil atau tercapai. Kepala Seksi Penyuluhan mengenai penyaluran BPNT ini menyebutkan keberhasilan program BPNT tidak lepas dari para aktor yang terkait dalam menjalankan program ini. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warung dan RPK di Kecamatan Balem Kabupaten Bojonegoro tentunya keberhasilan pelaksanaan BPNT tidak lepas dari para aktor dari desa dan para pendamping (agen pelaksana). Aktor-aktor penting dalam pelaksanaan penyaluran BPNT yang terdiri dari penanggung jawab BPNT, Koordinasi di desa dan kepala desa serta masyarakat setempat yang membantu dalam program BPNT melalui E-Warung di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada program BPNT sangat berperan penting karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif yang utama bertanggung jawab. Selaian itu, aktor pelaksana di desa Penganten dan Bulaklo memiliki sifat disiplin, tegas, baik dan ramah dalam melayani masyarakat selalu mendengarkan masukan dari KPM untuk itu karakteristik yang ideal dalam program BPNT di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengetahui peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara para PKM untuk dapat mengetahui bagaimana karakteristik pada masing-masing aktor pelaksana di desa Penganten dan desa Bulaklo dan hasilnya yaitu para aktor pelaksana mulai dari bapak Kepala desa, Penanggung Jawab, Agen Pelaksana setiap Desa, koordinasi, dan Ketua E- Warung dan RPK dari hasilnya observasi dan wawancara sudah memenuhi standart dalam masing- masing para aktor memiliki sifat yang sudah tertera dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang salah satunya berbunyi pelayanan kepada masyarakat harus berperilaku santun dan ramah .

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi ini sangat penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kebijakan yang sangat penting dalam koordinasi secara efektif, mulai dari penanggung jawab program hingga pelaksanaan program tersebut sehingga dapat mudah dalam mensukseskan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Komunikasi antar organisasi dalam BPNT melalui E-Warong dan RPK di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dari awal pelaksanaan BPNT tidak memiliki miskomunikasi antar aktor dari tingkat Desa maupun Pusat karena sebelumnya pelaksanaan program dari kemensos sudah memberikan sosialisasi yang cukup jelas kepada para KPM yang disampaikan di setiap desa yang disampaikan oleh Dinas Sosial yang di bantu oleh pendamping dan penanggung jawab pelaksana program BPNT, pada saat sebelum bantuan tersebut disalurkan ke semua KPM dikumpulkan di setiap desa untuk dijelaskan sebagaimana tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program BPNT melalui E-Warong dan RPK di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Tidak hanya itu namun penanggung jawab program BPNT selalu melakukan sosialisasi secara rutin, pada saat penyaluran BPNT agar masyarakat dapat mudah memahami sehingga dengan adanya sosialisasi komunikasi antar organisasi selalu terjalin dengan baik.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bojonegoro sangat diperlukan adanya respon yang baik dan positif dari para pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai, agar tujuan yang belum dicapai atau hendak tercapai bisa dilaksanakan dan diperbaiki lagi. Sikap para pelaksana yang terlibat dalam penyaluran BPNT di desa Penganten dan desa Bulaklo ini sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai tupoksi masing- masing sehingga masyarakat atau KPM merasa nyaman atas sikap pelaksana tersebut.

6. Lingkungan Social, Ekonomi dan Politik

Secara Lingkungan social, ekonomi, sosial dari penelitian yang saya dapat di ketahui dari segi masyarakat sangat merespon dengan adanya program BPNT ini masyarakat sangat mendukung adanya program ini. Hal ini dapat dilihat melalui masyarakat yang tidak mendapat bantuan ini tetap ikut serta membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warong, masyarakat yang tidak memperoleh bantuan tersebut ikut membantu dalam penataan maupun dalam mengangkut beras hanya saja beras dan telur yang di berikan kepada KPM tidak sesuai kriteria yang ada karena masih banyak yang berbau, berwarna, dan telurnya busuk sehingga tidak layak untuk diberikan kepada KPM. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Penganten dan Desa Bulaklo di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tujuan program ini salah satunya untuk memberikan nutrisi yang seimbang kepada KPM dengan tepat waktu dan tepat kualitas namun belum terlaksana

karena masih terjadi permasalahan pada mesin EDC yang error saat digunakan transaksi di Desa Bulaklo dan masih belum tepat kualitas dan tepat waktu Di desa Penganten sehingga menyebabkan Implementasi Program BPNT belum berjalan sesuai kriteria atau ketidakefektifan penyaluran BPNT.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti halnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Salah satu bidang yang dalam proses pembangunan yaitu bidang ekonomi, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 0,53 juta orang dibanding kondisi pada tahun 2018 yang sebesar 393,4 juta orang namun itu semua belum bisa menyempurnakan keadaan ekonomi di Indonesia meskipun sudah berkurang karena belum mencapai 70 persen keadaan ekonomi Indonesia membaik hanya saja 30 persen mengalami kenaikan . Salah satu indikator kemiskinan menurut BPS adalah masyarakat hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu, serta hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari dengan kata lain adalah kekurangan pangan.

Daftar Pustaka

- Databoks. (2019, 4). Jumlah penduduk miskin didesa mengalami penurunan. Retrieved from katadata.co.id/datapublish/2019/12/2020/jumlah- penduduk-miskin-di- desa-dan-kota- mengalami- penurunan*
- Hidayat, Y. R. (2018). Distribusi Beras Bulog Pacsa Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai.*
- Hotimah, S. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.*
- Ismail, M. (2019). Analisis program BPNT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi islam.*
- Kharismawati, I. s. (2017). Impleemntasi Program Pangan Non Tunai melalu.*